

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui landasan persamaan dan perbedaan variabel, objek, serta melihat hubungannya antar variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian dari Koswara (2011) Tentang Partisipasi Anggota dan Kinerja Gabungan Kelompok Tani Agropurna Mitra Mandiri Kabupaten Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah 1) mengukur tingkat partisipasi anggota dan manfaat yang diperoleh anggota Gapoktan Agropurna Mitra Mandiri; 2) mengukur hubungan antara tingkat partisipasi anggota dengan manfaat yang diperoleh anggota Gapoktan Agropurna Mitra Mandiri; dan 3) menganalisis dampak partisipasi anggota terhadap kinerja Gapoktan Agropurna Mitra Mandiri di bidang organisasi dan usaha. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan analisis kuantitatif untuk melihat kinerja kelompok dari segi organisasi dan usaha. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat partisipasi dan manfaat yang diterima anggota kelompok digunakan analisis kuantitatif. Hubungan korelasi antara manfaat dengan tingkat partisipasi anggota digunakan analisis korelasi *Rank Spearman*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa manfaat yang diperoleh anggota Gapoktan Agropurna Mitra Mandiri adalah jaminan pemasaran susu segar yang dihasilkan. Untuk tingkat partisipasi anggota Gapoktan di bidang organisasi dinilai tinggi untuk hadir dalam Rapat Anggota karena sebagian besar responden anggota Gapoktan menyatakan kehadiran lebih dari 75%. Namun dalam hal keaktifan Berdasarkan analisis korelasi *Rank Spearman* dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dengan partisipasi organisasi. Kinerja Gapoktan dari segi organisasi dapat dikatakan cukup baik.

Menurut Novita, dkk (2013) dalam penelitiannya yang mengkaji mengenai Partisipasi Dan Kinerja Perempuan Pada Program FEATI. Program FEATI (*Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information*) merupakan suatu program pemberdayaan dan pembangunan yang dikembangkan

oleh pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program FEATI yang telah berlangsung sejak tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui tingkat partisipasi dan kinerja perempuan; 2) Menganalisis tahap-tahap yang mempengaruhi tingkat partisipasi dan diduga mempengaruhi kinerja perempuan; dan 3) Menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi dengan kinerja perempuan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat partisipasi dan kinerja perempuan termasuk kategori sedang; 2) Tahap pelaksanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi perempuan serta kualitas sumberdaya manusia dan kualitas akses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perempuan; dan 3) Adanya hubungan yang kuat antara tingkat partisipasi dengan kinerja perempuan.

Menurut Rasminto (2015) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kinerja Pengurus Gapoktan Terhadap Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) di Kecamatan Bone-Bone. Kinerja pengurus mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk kuantitas output, kualitas output, kehadiran ditempat kerja, sikap kooperatif. Semua yang dilakukan oleh pengurus Gapoktan adalah untuk mencapai tujuan dari PUAP yakni meningkatkan pengembangan pelaku usaha agribisnis di kelembagaan petani dan ekonomi di pedesaan sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang hubungan antara kinerja pengurus terhadap keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Bone-Bone. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 orang responden yang merupakan anggota dari tiga gapoktan. penentuan sampel dilakukan dengan metode Gay. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS 20.0.

Menurut Sriati, dkk (2015) dalam penelitiannya Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) merupakan suatu upaya memberdayakan Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) dalam usaha distribusi

pangan pokok. Dalam program P-LDPM Pemerintah memberikan dana bantuan sosial, pembinaan dan bimbingan kepada Gapoktan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat partisipasi petani peserta Program P-LDPM, (2) mengetahui kinerja kelompok petani peserta Program P-LDPM, dan (3) menganalisis hubungan antara partisipasi petani dengan kinerja kelompok petani peserta Program P-LDPM. Penelitian menggunakan metode survey, dengan analisis deskriptif dan analisis korelasi. Sampel terdiri 70 petani responden, dari 7 kelompok tani Gapoktan Suka Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat partisipasi petani termasuk dalam kategori sedang; (2) kinerja kelompok petani termasuk dalam kategori tinggi; dan (3) terdapat hubungan positif signifikan antara partisipasi petani dengan kinerja kelompok petani P-LDPM dengan nilai koefisien korelasi Rank Spearman (R_s) = 0,89.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya persamaan pada penelitian ini adalah mengkaji tentang tingkat partisipasi pada suatu program dengan melihat kegiatan pada kelembagaan Gapoktan dan melihat hubungan partisipasi dengan kinerja yang telah ditentukan masing-masing peneliti. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah menganalisis tingkat partisipasi dan tingkat kinerja Gapoktan yang dapat dilihat melalui hubungan antara kedua variabel tersebut.

2.2 Tinjauan Partisipasi

2.2.1 Definisi Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Astuti (2009), partisipasi adalah pelibatan atau keikutsertaan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

Adisasmita *dalam* Solekhan (2014), berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal. Conyers *dalam* Solekhan (2014), menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya suatu program pembangunan akan gagal, 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tertentu, 3) Dalam perspektif demokrasi bahwa partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

2.2.2 Syarat tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat pada praktiknya sangat tidak terlepas dari adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan “pemerintah” kepada masyarakatnya (Mardikanto *dalam* Sriwahyuni, 2015). Masyarakat sering kali salah dipersepsikan, seperti halnya bahwa masyarakat sulit untuk dibawa pada kemajuan. Di sisi lain, kurang berkembangnya partisipasi masyarakat dapat pula dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dan terlalu lama direkayasa untuk tidak perlu berpikir oleh penguasa, sehingga lebih suka menerima, daripada berpikir, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan.

Menurut Mardikanto *dalam* Sriwahyuni (2015) unsur pokok yang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi; maksud dari kesempatan ini meliputi:
 - a. Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan.
 - b. Kesempatan memperoleh informasi tentang pembangunan.

- c. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 - d. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi, termasuk peralatan penunjang kegiatan pembangunan.
 - e. Kesempatan berorganisasi, termasuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan.
 - f. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan untuk menumbuhkan, menggerakkan, mengembangkan, dan memelihara partisipasi masyarakat.
2. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, seperti:
 - a. Kemampuan untuk menemukan kesempatan membangun atau menemukan kesempatan untuk memperbaiki mutu hidup.
 - b. Kemampuan melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
 - c. Kemampuan memecahkan masalah menggunakan sumberdaya yang tersedia atau kesempatan yang dimiliki.
 3. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, hal ini berkaitan dengan aspek sikap mental yang dimiliki, berupa:
 - a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
 - b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan.
 - c. Sikap tidak cepat puas dan selalu ingin memperbaiki mutu hidup.
 - d. Sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah.
 - e. Sikap kemandirian akan kemampuan untuk memperbaiki mutu hidup.

2.2.3 Tahapan Partisipasi

Menurut Mardijani (2010), setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayahnya. Dengan demikian perlu adanya suatu tahapan agar suatu program

dapat dijalankan dengan baik dan berjalan sesuai fungsinya. Adapun tahapan partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Partisipasi dalam Perencanaan Kegiatan.

Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup perumusan tujuan, maksud dan target.

2. Tahap Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan sebagainya.

3. Tahap Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan.

4. Tahap Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan.

Partisipasi dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2.2.4 Jenis dan Pendekatan Partisipasi

Club Du Sahel *dalam* Purnamasari (2008) mendeskripsikan pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan partisipasi dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1 Pendekatan Partisipasi Masyarakat

No.	Jenis Partisipasi	Pendekatan	Keterangan
1.	Partisipasi Pasif, Pelatihan dan Informasi	Pendekatan “kami lebih tahu apa yang baik bagimu”.	Komunikasi satu arah seperti antaraguru dan murid yang diterapkan antara staf proyek dan masyarakat.
2.	Partisipasi Aktif	Pendekatan “pelatihan dan Kunjungan”.	Dialog dan komunikasi 2 arah memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas penyuluh dan pelatih dariluar.

3.	Partisipasi dengan Keterikatan	Pendekatan “kontrak, tugas yang dibayar”. Bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu.	Masyarakat setempat, baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas setiap kegiatan pada masyarakat atau proyek. Model ini memungkinkan untuk beralih dari model klasik kepada model yang diberi subsidi, dimana panitia setempat bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan tugas. Manfaatnya: dapat dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan.
4.	Partisipasi Atas Permintaan setempat	Kegiatan yang didorong oleh permintaan.	Kegiatan yang brefokus untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan pihak luar. Kegiatan bukanlah proyek yang tipikal: tidak ada sasaran untuk suatu periode tertentu, tidak ada rencana dan struktur proyek dan tidak ada komando satu arah dari proyek kepada kelompok sasaran. Masalahnya: bagaimana masyarakat setempat dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi.

Sumber: Club Du sahel dalam Purnamasari (2008)

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Kalesaran (2015) menyebutkan bahwa yang membedakan partisipasi atas empat jenis berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, antara lain:

1. *Participation in Decision Making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan.

Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

2. *Participation in Implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang diparticipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.
3. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
4. *Participation in Evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya, memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Jika dilihat dari teori Cohen dan Uphoff tersebut, partisipasi masyarakat dalam penelitian ini termasuk bentuk *Participation in Benefit*, dimana masyarakat hanya berpartisipasi dalam mendapatkan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan pelaksanaan program.

2.2.5 Tingkatan Partisipasi

Menurut Pretty dalam Kalesaran (2015), terdapat tujuh (7) karakteristik tipologi partisipasi yang berturut-turut smakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu:

1. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak

memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.

2. Partisipasi informatif. Masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. Mandiri (*self mobilization*). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan digunakan.

2.2.6 Kendala dalam Meningkatkan Partisipasi

Ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan. Soetomo *dalam* Mustikawati (2016) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Menurut Slamet *dalam* Mustikawati (2016), untuk faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan.

b. Faktor eksternal

Menurut Sunarti *dalam* Mustikawati (2016), faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator.

Dengan adanya hambatan atau kendala dalam peningkatan partisipasi, pemerintah juga perlu mencari cara untuk membangkitkan partisipasi. Usaha untuk menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan dalam membangun masyarakat. Menurut Kusnaedi *dalam* Surotinojo (2009) masyarakat dapat dibangkitkan melalui upaya sebagai berikut:

1. Menggunakan prinsip pertukaran dasar (*basic exchange principles*), yaitu melalui pendekatan timbal balik manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat. Semakin banyak manfaat yang diduga akan semakin kuat pihat tersebut akan terlibat dalam kegiatan.
2. Memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosial sehingga motivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi.

2.2.7 Partisipasi Petani Anggota Gapoktan

Keikutsertaan petani dalam membentuk sebuah kelompok pada suatu kegiatan menjadikan cara yang lebih cepat untuk mencapai tujuan pada sebuah program. Artinya masyarakat petani diberi kemampuan untuk mengelola potensi dalam kelompok yang dimiliki secara mandiri. Partisipasi dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi petani yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut

Partisipasi petani merupakan keikutsertaan dari petani baik secara individu maupun secara kelompok dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam bidang usaha pertanian. Didalam melaksanakan program, partisipasi petani dalam sebuah kelompok sebagai yang menjalankan sebuah program merupakan faktor yang sangat penting. Partisipasi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam berpendapat Menurut Van Den Ban dan Hawkins *dalam* Koampa (2015), ditinjau dari segi motivasinya, partisipasi terjadi karena:

1. Takut/ terpaksa, partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa atau takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan.
2. Ikut-ikutan, partisipasi dalam ikut-ikutan hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama masyarakat desa, apalagi yang memulai adalah pemimpin mereka, sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja.
3. Kesadaran, partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri. Partisipasi bentuk yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat berkembang dalam masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi yang didasarkan atas kesadaran, maka masyarakat dapat diajak memelihara dan meraa memiliki objek pembangunan yang diselenggarakan didesa tersebut.

2.3 Tinjauan Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut Sedarmayanti dalam Rasminto (2015), *performance* diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja. Menurut Withmore dalam Uno dan Nina (2012), kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari peran seseorang dalam bekerja. Menurut pendapat Robbins dalam Thoyib (2005), kinerja istilah lainnya adalah *human output* yang dapat diukur dari *productivity, absence, turnover, citizenship, dan satisfaction*. Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja disuatu organisasi merupakan hal penting.

Menurut Kusnadi dalam Rasminto (2015), kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. Sedangkan Gibson dalam Uno dan Nina (2012), Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, artinya ukuran utama keberhasilan suatu organisasi adalah adanya bentuk tanggung jawab. Dari definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa kinerja adalah tingkat seluruh keluaran baik kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan oleh pegawai yang merupakan hasil dari pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan dalam suatu waktu menurut tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa kinerja perlu dirumuskan guna dijadikan tolok ukur dalam mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diberikan kepadanya.

2.3.2 Indikator Kinerja

Kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Menurut Mahmudi dalam Kharisma (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengurus yaitu :

1. Faktor Personal
Pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh individu.
2. Faktor Kepemimpinan
Kualitas dalam memberikan dorongan, semangat dan dukungan yang diberikan manajer.
3. Faktor Tim Peliput
Kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, Kekompakkan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor Sistem
sistem kerja, fasilitas kerja dan infrastruktur yang diberikan oleh organisasi.
5. Faktor Kontekstual
Tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

2.3.3 Sistem Penilaian Kinerja

Menurut Sedarmayanti *dalam* Kharisma (2016), penilaian kerja (*performence appraisal*) dalam rangka pengembangan sumber daya manusia mempunyai arti yang penting. Hal ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan organisasi, setiap orang sebagai sumber daya manusia ingin mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang adil dari pimpinan organisasi yang bersangkutan. Dalam kehidupan suatu organisasi, ada beberapa asumsi tentang perilaku manusia sebagai sumber daya manusia, yang mendasari pentingnya penilaian prestasi kerja. Asumsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ingin memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan kerjanya sampai tingkat yang maksimal.
2. Setiap orang ingin mendapatkan penghargaan apabila dinilai melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Setiap orang ingin mengetahui secara pasti tentang karier yang akan diraihnyaa apabila melaksanakan tugasnya dengan baik.
4. Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan yang obyektif dan penilaian atas dasar prestasi kerjanya.
5. Setiap orang bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar.

6. Setiap orang pada umumnya tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya rutin.

2.3.4 Kinerja Gapoktan

Frank *dalam* Uno dan Nina (2012), menegaskan bahwa kinerja merupakan suatu proses untuk menciptakan pemahaman bersama dalam sebuah hasil pekerjaan/kegiatan yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Adapun proses dalam sebuah kinerja meliputi: strategi dan sasaran, pembatasan pekerjaan, penentuan sasaran, pelatihan dan pemberian nasihat, tinjauan atas kinerja, pelatihan keterampilan, pembayaran atau pengupahan berdasarkan kinerja, serta adanya pelatihan dan pengembangan. Dalam hal ini kinerja Gapoktan merupakan prestasi yang dicapai oleh Gapoktan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan Gapoktan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja Gapoktan dapat diketahui melalui proses perbandingan antara hasil yang diperoleh Gapoktan dengan standar/target yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu.

Menurut Dharma *dalam* Marandeka (2015), target atau standar yang telah ditentukan kelompok berhubungan dengan sasaran dan kontribusi yang diharapkan bagi pencapaian target tersebut. Selanjutnya, Dharma *dalam* Marandeka (2015), juga menyatakan bahwa sasaran atau target kelompok dapat dinyatakan dengan istilah seperti; a) target yang dapat dikualifikasikan, misalkan peningkatan hasil penjualan produk; b) target yang harus diselesaikan secara memuaskan pada periode tertentu, seperti pemenuhan kebutuhan anggota kelompok; dan c) target dan aspirasi kualitatif, seperti kerjasama antar anggota kelompok. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa kinerja Gapoktan terbagi menjadi dua bagian yaitu kinerja organisasi dan kinerja usaha.

2.4 Tinjauan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Menurut Syahyuti (2007), Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi

dengan adanya kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya adanya kelemahan terhadap lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyediaan sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi dari luar. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran penting terhadap pertanian.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani di perdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Pembentukan Gapoktan biasanya dibentuk atas dasar: (1) Kepentingan yang sama diantara para anggotanya, (2) Berada pada kawasan usahatani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya, (3) Mempunyai kader pengelola yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani, (4) Memiliki kader atau pemimpin yang diterima oleh petani lainnya, (5) Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, dan (6) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat (Kementrian Pertanian, 2010).

Penggabungan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompok tani yang berkembang dan bergabung ini disebut Gabungan kelompok tani (Gapoktan). Menurut Hidayati (2011), Gapoktan yang kuat dan mandiri dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Adanya pertemuan atau rapat anggota atau pengurus yang diselenggarakan secara berkala atau berkesinambungan.
2. Disusunya rencana kerja Gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi.
3. Meiliki aturan atau norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama.
4. Memiliki pencatatan atau pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapi.

5. Memfasilitasi kegiatan usaha bersama disektor hulu maupun hilir.
6. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar.
7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya.
8. Adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dan pihak lain.
9. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gapoktan.

2.5 Tinjauan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)

2.5.1 Definisi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)

Berdasarkan Pedoman Umum Kegiatan Penguatan LDPM (2015), kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah bagian dari kegiatan program Peningkatan Ketahanan Pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dan unit-unit usaha yang di kelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan) dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usaha dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah Gapoktan. Kegiatan P-LDPM dibiayai melalui APBN TA 2009 dengan mekanisme dana bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan langsung kepada rekening Gapoktan.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan P-LDPM adalah untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan ditingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui pengembangana unit-unit usaha (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan) dan pembangunan sarana penyimpanan milik Gapoktan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambahproduksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.

2.5.2 Tujuan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)

Berdasarkan Pedoman Umum Kegiatan Penguatan LDPM (2015), tujuan dari pelaksanaan kegiatan P-LDPM adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Gapoktan untuk mengembangkan unit usaha distribusi hasil pertanian yang mencakup pembelian,

penyimpanan, pengelolaan, dan penjualan hasil pertanian dalam rangka mendorong stabilitas harga pangan strategis.

2. Meningkatkan kemampuan Gapoktan untuk mengembangkan unit cadangan pangan untuk menyimpan pangan (gabah/beras dan jagung) dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Meningkatkan kemampuan unit usaha distribusi hasil pertanian atau unit usaha pemasaran milik gapoktan dalam mengembangkan jejaring distribusi pangan dengan mitra diluar wilayahnya.

2.5.3 Sasaran Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)

Berdasarkan Pedoman Umum Kegiatan Penguatan LDPM (2015), sasaran kegiatan P-LDPM secara Nasional adalah:

1. Gapoktan di daerah sentra produksi padi maupun jagung.
2. Gapoktan yang memiliki unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan.
3. Gapoktan yang memiliki lahan sendiri untuk membangun sarana penyimpanan (gudang).

2.5.4 Petunjuk Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)

Berdasarkan Pedoman Umum Kegiatan Penguatan LDPM (2015), alokasi dana APBN tahun 2010 untuk pelaksanaan kegiatan P-LDPM berupa dana Bansos digunakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan penguatan modal usaha Gapoktan pada:

A. Tahap Penumbuhan

1. Sasaran

Sasaran untuk Tahap Penumbuhan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2015 adalah memberdayakan 203 (dua ratus tiga) Gapoktan tersebar di 25 (dua puluh lima) provinsi di daerah sentra produksi padi sehingga Gapoktan mampu secara swadaya membangun sarana penyimpanan (gudang) yang akan menjadi miliknya sendiri, menyediakan cadangan pangan, dan memasarkan/mendistribusikan/ mengolah gabah/beras hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung, serta meningkatkan pendapatan petani/Gapoktan dan akses pangan.

2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Penumbuhan antara lain:

a. Indikator Masukan (*input*):

- 1) Dana Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 bagi 203 (dua ratus tiga) Gapoktan.
- 2) Terseleksinya 203 (dua ratus tiga) orang Pendamping yang berada di wilayah Gapoktan binaan.
- 3) Terseleksinya 203 (dua ratus tiga) Gapoktan di daerah sentra produksi padi/jagung.

b. Indikator Keluaran (*output*):

Tersalurkannya Dana Belanja Bantuan Sosial Penguatan-LDPM kepada 203 (dua ratus tiga) Gapoktan sasaran sebagai modal usaha pada unit-unit usaha yang dikelolanya untuk:

- 1) Pengembangan/pembangunan 203 (dua ratus tiga) sarana penyimpanan (gudang) secara swadaya yang dilakukan oleh Gapoktan sasaran.
- 2) Pengadaan gabah dan/atau beras sebagai cadangan pangan yang dilakukan oleh 203 (dua ratus tiga) unit pengelola cadangan pangan.
- 3) Pembelian gabah dan/atau beras dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung yang dilakukan oleh 203 (dua ratus tiga) unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan.

c. Indikator Hasil (*outcome*) :

- 1) Tersedianya cadangan pangan (gabah, dan/atau beras) di 203 (dua ratus tiga) gudang milik Gapoktan.
- 2) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah dan/atau beras, yang dilakukan oleh 203 (dua ratus tiga) unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan minimal 2 (dua) kali putaran. 2 (dua) kali putaran merupakan realisasi kegiatan pembelian dan penjualan gabah dan/atau beras dimana akumulasi volumenya ≥ 2 (dua) kali dari target volume yang harus dibeli, sesuai dengan alokasi Dana Belanja Bantuan Sosial yang diterima pada unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan pada tahun pertama.

- 3) Meningkatnya modal usaha Gapoktan melalui kegiatan jual-beli gabah/beras.

B. Tahap Pengembangan

1. Sasaran

Sasaran untuk Tahap Pengembangan kegiatan P-LDPM Tahun 2015 adalah 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan yang sudah melalui Tahap Penumbuhan yang akan dievaluasi oleh provinsi dan kabupaten/kota dan dinyatakan layak dan siap untuk masuk ke Tahap Pengembangan.

2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2015 antara lain:

a. Indikator Masukan (*input*):

- 1) Dana Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2015 sebagai tambahan modal usaha unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan/atau unit pengelolaan cadangan pangan di 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan.
- 2) Tersedianya 38 (tiga puluh delapan) orang Pendamping tahun 2015 yang siap untuk melanjutkan pembinaan terhadap Gapoktan di wilayahnya.
- 3) Tersedianya 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan yang siap untuk menerima Dana tambahan Bantuan Sosial Tahun 2015.

b. Indikator Keluaran (*output*):

Tersalurkannya Dana Belanja Bantuan Sosial P-LDPM kepada 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan sasaran sebagai tambahan modal usaha pada unit-unit usaha yang dikelolanya untuk:

- 1) Pengadaan gabah dan/atau beras sebagai cadangan pangan yang dilakukan oleh 38 (tiga puluh delapan) unit pengelola cadangan Pangan.
- 2) Pembelian gabah, beras, dan/atau jagung yang dilakukan oleh 38 (tiga puluh delapan) unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan.

c. Indikator Hasil (*outcome*):

- 1) Tersedianya cadangan pangan (gabah dan/atau beras) di 38 (tiga puluh delapan) gudang milik Gapoktan.

- 2) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung dari alokasi Dana Belanja Bantuan Sosial 2015 yang diperoleh dari tahun pertama dan kedua di 38 (tiga puluh delapan) unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan lebih dari 2 kali putaran. 2 (dua) kali putaran merupakan realisasi kegiatan pembelian dan penjualan dimana akumulasi volumenya >> 2 kali dari target volume yang harus dibeli, sesuai dengan alokasi Dana Belanja Bantuan Sosial yang diterima pada tahun pertama dan tahun kedua di unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan.
- 3) Meningkatnya modal usaha menjadi lebih besar dari Dana Belanja Bantuan Sosial yang telah diterimanya.

d. Indikator Manfaat (*benefit*):

- 1) Dana Belanja Bantuan Sosial dari pemerintah sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Gapoktan yang terseleksi untuk melakukan kegiatan pembelian gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya.
- 2) Minimal petani produsen gabah, beras dan/atau jagung yang menjadi anggota Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM sudah memperoleh harga yang layak terutama pada saat panen raya serendah-rendahnya sesuai HPP untuk gabah/beras, maupun HRD untuk jagung.
- 3) Minimal anggota Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan- LDPM dapat memperoleh akses pangan dengan mudah disaat mereka menghadapi musim paceklik.
- 4) Minimal kemampuan manajemen Gapoktan dan unit-unit usahanya sudah semakin baik, transparan dan akuntabel.

e. Indikator Dampak (*impact*):

- 1) Terwujudnya stabilitas harga gabah, beras, dan/atau jagung di wilayah Gapoktan.
- 2) Terwujudnya Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga petani.
- 3) Meningkatnya ekonomi pedesaan yang bersumber dari komoditas pangan.
- 4) Meningkatnya pendapatan petani padi dan jagung yang berada di wilayah Gapoktan.

C. Tahap Kemandirian

1. Sasaran

Sasaran dari pembinaan tahun ketiga kegiatan P-LDPM Tahun 2015 merupakan 102 (seratus dua) Gapoktan yang sudah ditumbuhkan pada tahun 2012 dan 2013 untuk dapat menjadi Gapoktan yang mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya sehingga tidak tergantung kepada bantuan pemerintah.

2. Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2015 antara lain:

a. Indikator Hasil (*outcome*):

- 1) Meningkatnya modal usaha Gapoktan lebih besar dari total Dana Belanja Bantuan Sosial yang telah diterimanya pada tahun pertama dan tahun kedua.
- 2) Tersedianya cadangan pangan (gabah, dan/atau beras) di 102 (seratus dua) gudang milik Gapoktan.
- 3) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah/beras/jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung di 102 (seratus dua) unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan lebih dari 2 (dua) kali putaran. 2 (dua) kali putaran merupakan realisasi kegiatan pembelian dan penjualan dimana akumulasi volumenya lebih dari 2 kali dari target volume yang harus dibeli sesuai dengan alokasi Dana Belanja Bantuan Sosial pada unit distribusi/pemasaran/ pengolahan tahun pertama, tahun kedua dan akumulasi keuntungan.

b. Indikator Manfaat (*benefit*):

- 1) Dana Belanja Bantuan Sosial yang sudah diterima Gapoktan selama 2 (dua) tahun masih dikelola dengan baik dan tersedia di Gapoktan untuk mendukung kegiatan pembelian dan penjualan gabah, beras dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung maupun cadangan pangan pada tahun 2015.
- 2) Minimal harga gabah, beras, dan/atau jagung terkendali/stabil di wilayah Gapoktan terutama pada saat panen raya.

- 3) Minimal anggota Gapoktan dapat memperoleh akses pangan dengan mudah pada saat musim paceklik atau tidak ada panen.
- 4) Minimal kemampuan manajemen Gapoktan dan unit-unit usahanya meningkat, transparan dan akuntabel dalam mengelola asetnya.

c. Indikator Dampak (*impact*):

- 1) Terwujudnya stabilitas harga gabah, beras, dan/atau jagung di wilayah Gapoktan.
- 2) Meningkatnya jumlah anggota Gapoktan yang mempunyai akses pangan sehingga terwujud Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga petani.
- 3) Meningkatnya pendapatan petani padi dan jagung yang berada di wilayah Gapoktan.

2.5.5 Pelaksanaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)

Tahap Penumbuhan alokasi dana Bansos yang diberikan kepada Gapoktan sebesar Rp. 150.000.000 dengan komponen untuk pelaksanaan kegiatan antara lain untuk: (a) pembangunan atau renovasi gudang milik Gapoktan untuk penyimpanan pangan; (b) penguatan Gapoktan untuk dapat melakukan pengadaan gabah/beras, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya sebagai cadangan pangan; dan (c) penguatan modal usaha Gapoktan untuk dapat melakukan pembelian-penjualan gabah/beras dari petani anggotanya dan/atau di luar anggotanya pada saat panen raya minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah/beras.

Untuk Tahap Pengembangan dana Bansos sebesar Rp. 75.000.000 per Gapoktan yang akan disalurkan ke Gapoktan pada tahap pengembangan (tahun kedua) yang sudah dievaluasi kelayakannya untuk mendapat tambahan modal dari Bansos tahun kedua. Komponen kegiatan untuk dana Bansos tahun kedua antara lain: (a) pembelian-penjualan gabah/beras/jagung dari petani anggotanya dan/atau di luar anggotanya pada saat panen raya; dan atau (b) untuk pengadaan gabah/beras dan/atau jagung dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya dalam rangka memperkuat cadangan pangan.

Apabila Gapoktan Tahap Penumbuhan belum memenuhi persyaratan untuk dapat masuk ke Tahap Pengembangan, maka Dana Bansos yang akan

diberikan sebesar Rp 75.000.000 belum dapat dicairkan menunggu sampai Gapoktan dinyatakan siap untuk dapat masuk dalam Tahap Pengembangan oleh Tim Teknis dan ditetapkan oleh Tim Pembina. Selanjutnya Gapoktan yang belum siap untuk masuk dalam Tahap Pengembangan wajib untuk dibina secara terus menerus secara berjenjang mulai dari Pendamping, Tim Teknis Kab/Kota dan Tim Pembina Provinsi sehingga Gapoktan tersebut dianggap mampu untuk masuk dalam Tahap Pengembangan.

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah merupakan modal awal bagi Gapoktan Tahap Penumbuhan dan modal tambahan bagi Gapoktan Tahap Pengembangan dan unit-unit usaha yang dikelolanya sehingga mampu meningkatkan usahanya, mampu memupuk dan mengembangkan modal yang telah diberikan dan sekaligus mampu mendekatkan akses pangan bagi anggotanya melalui cadangan pangan. Dengan semakin meningkatnya posisi tawar petani, nilai tambah produk pertanian dan akses pangan petani terhadap pangan maka diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani juga akan semakin meningkat. Dampak akhir dari seluruh dukungan pemerintah tersebut melalui kegiatan P-LDPM adalah mampu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani sehingga petani mempunyai semangat untuk melakukan kegiatan produksi secara berkelanjutan dan dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan wilayah.

Pada Tahap Penumbuhan, hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu: a) membentuk Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; b) Penetapan KPA/PPK dan Bendahara; c) menyusun dan memperbanyak Juklak dan Juknis; d) identifikasi, verifikasi, dan penetapan Gapoktan dan pendamping; dan e) menghimpun basis data Gapoktan dan pendamping.

Sedangkan pada Tahap Pengembangan, hal-hal yang perlu dipersiapkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain: (a) melakukan evaluasi secara berjenjang terhadap kinerja Gapoktan yang telah ditumbuhkan tahun 2009 mencakup: pembangunan/renovasi gudang, pemanfaatan dana Bansos untuk pengadaan cadangan pangan dan pembelian, perputaran dari kegiatan pembelian–

penjualan, pengelolaan cadangan pangan; dan (b) evaluasi terhadap kinerja pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan Gapoktan.

Untuk menubuhkan keberadaan Gapoktan telah dilakukan pembinaan teknis baik secara formal maupun non formal. Penyuluh yang bertanggungjawab dengan wilayahnya bertugas sebagai petugas pendamping bersama dengan petugas kantor ketahanan pangan telah melakukan pembinaan sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan manajemen Gapoktan mencakup:
 - a. Perencanaan
 - b. Pembukuan untuk kegiatan pengembangan usaha distribusi hasil pertanian atau usaha pemasaran dan pengolahan hasil pertanian serta pengelolaan cadangan pangan
 - c. Pelaporan
 - d. Peningkatan kemampuan teknis sesuai kebutuhan tentang pengelolaan komoditas dalam rangka peningkatan nilai tambah
2. Penyusunan Rencana Kegiatan mengacu pada alur pikir kegiatan penguatan LDPM yang berisi:
 - a. Volume pembelian dan pengelolaan gabah/beras dari petani anggota
 - b. Volume gabah/beras yang akan dijual dan disimpan sebagai penguatan cadangan pangan
 - c. Kegiatan penunjang (penyiapan tempat/gudang, dan fasilitas penyimpanan)
 - d. Rencana pemupukan cadangan pangan
 - e. Rencana Pembiayaan
3. Pembuatan desain untuk pembangunan gudang dengan kapasitas 30-40 ton.
4. Pengembangan jejaring kemitraan usaha distribusi hasil pertanian.
5. Pembinaan administrasi Gapoktan

2.6 Tinjauan Ketahanan Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan dapat dicirikan melalui ketersediaan pangan yang cukup dan merata diseluruh wilayah, serta kemampuan rumah tangga mengkonsumsi pangan yang cukup untuk hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Menurut Badan Ketahanan Pangan

(2012) ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan baik wilayah maupun nasional. Berdasarkan konsep tersebut, suatu negara dapat mencapai tingkat ketahanan pangan yang baik diukur dari tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, meskipun kebutuhan pangan tersebut terpenuhi dengan cara membeli produk impor, kecukupan pangan menjamin bahwa setiap individu akan mampu hidup sehat dan aktif saja tidak cukup, karena hal tersebut muncul konsep kemandirian pangan yang memberikan penekanan pada pentingnya melepaskan diri pada produk impor. Konsep kemandirian pangan menitikberatkan pada pentingnya pemenuhan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Keterlibatan sumberdaya lokal dalam mengelola sumber daya lokal yang berkontribusi pada kemandirian pangan menjadi faktor penting dalam membangun kemandirian pangan sehingga terbentuk suatu kedaulatan pangan. Partisipasi aktif masyarakat lokal diyakini akan menjadikan lingkungan sekitar dan kondisi budaya serta politik pangan masyarakat lokal lebih berkembang.

Menurut Suryana (2008), mengenai sistem Ketahanan Pangan Nasional terdiri dari tiga sub sistem, yaitu:

1. Penyedia atau pasokan pangan bersumber dari produksi sendiri, impor, dan stik tahun lalu dikurangi ekspor. Untuk pangan pokok dan strategis, penyedia harus dipenuhi dari produksi domestik dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara optimal.
2. Penyalur atau distribusi pangan dikembangkan untuk memperbaiki akses atau keterjangkauan fisik dan ekonomi masyarakat atas pangan. Secara umum distribusi pangan harus diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi hanya untuk kebutuhan pangan pokok dan strategis, karena campur tangan pemerintah masih diperlukan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada distribusi pangan dilakukan pengelolaan cadangan pangan dan kebijakan harga.
3. Pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan subsistem yang kinerjanya sangat ditentukan oleh dua subsistem sebelumnya. Indikator kinerja dalam pemanfaatan pangan adalah apabila seluruh rumah tangga dapat mengkonsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang sehingga dapat mendukung seorang untuk hidup sehat dan produktif.

Ketahanan pangan adalah sebuah konsep yang fleksibel dan biasanya diterapkan pada tingkat agregasi nasional, regional, rumah tangga maupun individu. Tujuan dari ketahanan pangan harus diorientasikan sebagai suatu keadaan dimana semua orang, pada setiap saat mampu memiliki akses fisik, sosial, ekonomi atas pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk aktif dan hidup sehat.

